

BIROKRAT

JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Pola Budaya dan Kinerja Organisasi Publik (Studi
pada Pemerintah Kota Kendari)
Muh. Nur Yamin

Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa
dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa
Haryani Idris

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota dalam
Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi pada Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar)
Muh. Nur, dkk.

Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Kualitas
Pelayanan Publik (Studi di Kota Kendari Sulawesi
Tenggara)
Aminuddin

Analisis Disparitas Pendapatan di Kecamatan
Galesong Selatan Kabupaten Takalar
Muhammad Hasan

Evaluasi Pembelajaran Dosen di Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri Makassar
Fakhri Kahar dan Ismail

Pengaruh Tingkat Pemanfaatan Komputer terhadap
Produktivitas Kerja Pegawai di Fakultas Ilmu Sosial
UNM
Syarifah Balkis



Diterbitkan Oleh :
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar

JURNAL BIROKRAT ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Volume 1 Nomor 2 / Juni 2014, ISSN: 2354-5925

Terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan ilmiah dalam bentuk hasil-hasil kajian analitis, penelitian, aplikasi teori tentang masalah-masalah administrasi publik. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas serta menyebarkan kajian administrasi publik, disamping sebagai wahana komunikasi diantara para dosen, praktisi, dan pemerhati masalah-masalah administrasi publik.

JURNAL BIROKRAT ILMU ADMINISTRASI PUBLIK Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik

PENERBIT

Prodi Ilmu Administrasi Negara FIS UNM

DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum.
Dr. H. Ahmad Mappaenre, M.Si.
Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.Si

PEMIMPIN UMUM

Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si.

KETUA PELAKSANA

Ismail, S.Pd., M.Si.

WAKIL KETUA

Sulmiah, S.Pd., M.AP.

PENYUNTING AHLI:

Prof. Dr. Rifdan, M.Si.
Prof. Dr. Mannan Sailan, M.Hum.
Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si.
Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si.

STAF SEKRETARIAT

Muh. Luthfi Siraj, S.Pd.
Wahyu

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FIS Universitas Negeri Makassar
Kampus UNM Gunungsari Baru Makassar, Telp. (0411) 5392333,
Call Center : 081355091979, E-mail: injurytime79@gmail.com
Website: ian.unm.ac.id

JURNAL BIROKRAT ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Volume 1 Nomor 2 / Juni 2014, ISSN: 2354-5925

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Pola Budaya dan Kinerja Organisasi Publik (Studi pada Pemerintah Kota Kendari) Muh. Nur Yamin.....	1 - 14
2. Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Haryani Idris.....	15 - 22
3. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar) Muh. Nur, dkk.....	23 - 36
4. Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Kota Kendari Sulawesi Tenggara) Aminuddin.....	37 - 46
5. Analisis Disparatis Pendapatan di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Muhammad Hasan.....	47 - 54
6. Evaluasi Pembelajaran Dosen di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Fakhri Kahar dan Ismail.....	55 - 64
7. Pengaruh Tingkat Pemanfaatan Komputer terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Syarifah Balkis.....	65 - 72



ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN DI KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR

Muhammad Hasan

Staf Pengajar Program Studi Pendidikan Ekonomi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

Jl. A.P. Pettarani Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar 90222

email: hasdiansa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disparitas pendapatan di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dan faktor-faktor penyebab disparitas pendapatan tersebut. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Indeks Williamson. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Kecamatan Galesong Selatan adalah disparitas sedang dan cenderung mengalami peningkatan selama periode 2007-2011 dan faktor-faktor yang menyebabkan disparitas pendapatan di Kecamatan Galesong Selatan yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.

Kata kunci: Disparitas pendapatan

ABSTRACT

This study aims to determine the income disparity in the District of South Galesong and factors - factors that cause the income disparity. Data was collected using interviews and documentation techniques. Data were analyzed using the Williamson Index. Research results show that the inequality in the District of South Galesong is moderate and the disparity tends to increase during the period 2007 - 2011 and the factors-factors that cause disparities of income in the District of South Galesong namely economic factors and non-economic factors.

Keywords: Disparity in income

PENDAHULUAN

Kemajuan ekonomi suatu daerah dinilai dari beberapa aspek. Salah satunya adalah berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar selama dua belas tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut didukung oleh perkembangan kinerja dan struktur perekonomian Kabupaten Takalar. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Takalar dari tahun ke tahun dimiliki oleh sektor pertanian, jasa, perdagangan dan industri. Terhadap sumbangannya pada PDRB tahun 2011, kontribusi dari sektor pertanian sebesar 52,94 persen dan sektor jasa sebesar 23,46 persen sedangkan sektor

perdagangan sebesar 9,58 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 6,17 persen. Dengan demikian, sektor pertanian dan sektor jasa merupakan sektor yang bisa diharapkan lebih meningkatkan perekonomian Kabupaten Takalar (Kabupaten Takalar dalam Angka, 2012).

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan tersebut juga diikuti dengan pendapatan perkapita Kabupaten Takalar yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Secara berangsur pendapatan per kapita naik mulai dari Rp. 6.890.922 pada tahun 2009 hingga mencapai angka tertingginya di tahun 2011 yaitu Rp. 8.696.171 (Kabupaten Takalar dalam Angka, 2012). Kenaikan pendapatan perkapita tersebut memiliki makna sebagai kenaikan status ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, kondisi empiris tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Kabupaten Takalar mengalami pergerakan positif. Namun, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang meningkat belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Takalar.

Terdapat beberapa teori ekonomi yang menunjukan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan, jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Walaupun teori hipotesis U-Terbalik Kuznets ini tidak menjelaskan berapa tahun proses pembangunan pada tahap awal dan pembangunan tahap akhir (Tambunan, 2001:75). Data empirik pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Takalar, Tahun 1999-2010

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Kemiskinan (%)
1999	4,57	9,07
2000	5,07	9,37
2001	5,09	10,09
2002	5,13	13,77
2003	5,32	14,09
2004	5,44	13,99
2005	5,58	12,43
2006	5,91	14,09
2007	6,04	13,8
2008	6,19	12,68
2009	6,58	12,44
2010	6,85	12,05

Sumber: Kabupaten Takalar dalam Angka, 2012.

Tabel 1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar kearah yang positif. Pada tahun 1999 sampai 2010 menunjukkan suatu peningkatan setiap tahunnya, dari 4,57 persen hingga mencapai 6,85 persen. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat merupakan tujuan setiap daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya termasuk Kabupaten Takalar. Namun, berdasarkan data pada tabel tersebut terlihat bahwa terjadi suatu ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Pada periode 1999 sampai 2010, pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat akan tetapi tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi. Bahkan pada tahun 1999 sampai 2003 walaupun pertumbuhan ekonomi semakin meningkat tapi tingkat

kemiskinan juga meningkat dari 9,07 persen sampai 14,09 persen. Kemudian berfluktuasi dari tahun 2004 sampai 2010 dan terjadi penurunan kemiskinan secara persentase hingga mencapai 12,05 persen tapi penurunan ini belum signifikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar yang tinggi.

Pada tahun 2007 sampai 2010 Kecamatan Galesong Selatan merupakan kecamatan yang jumlah industrinya paling banyak bila dibandingkan dengan kecamatan lain yang terdapat di Kabupaten Takalar. Tetapi pada tahun 2011 jumlah industri di Kecamatan Galesong Selatan menurun sebanyak 351 buah dari 498 dari tahun 2010 (Kabupaten Takalar dalam Angka, 2012). Dengan menurunnya jumlah industri di Kecamatan Galesong Selatan membuat permintaan terhadap tenaga kerja semakin berkurang, sehingga hal tersebut menyebabkan meningkatnya pengangguran dan membuat distribusi pendapatan semakin tidak merata. Seperti yang dikemukakan oleh Adelman dan Morris (1973), bahwa salah satu dari 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

Berdasarkan fakta empirik tersebut, peneliti menganggap bahwa penting untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan di Kecamatan Galesong Selatan. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui dampak kebijakan pembangunan daerah di Takalar yang sudah dilakukan selama ini. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kabupaten Takalar, khususnya Galesong Selatan mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Indikator ini juga akan menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam mempertimbangkan ketimpangan distribusi pendapatan sebagai pertimbangan dalam strategi pembangunan dan memprioritaskan kebijakan penanggulangan ketimpangan pendapatan atau kesenjangan ekonomi di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan didasari oleh alasan bahwa Kecamatan Galesong selatan merupakan salah satu kecamatan yang berkembang di Kabupaten Takalar, yang mengalami penurunan jumlah industri yang cukup drastis pada tahun 2011, sehingga hal tersebut akan menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar, jumlah kemiskinan Kabupaten Takalar, jumlah penduduk di Kabupaten Takalar, PDRB Kecamatan Galesong Selatan dan jumlah penduduk di Kecamatan Galesong selatan pada tahun 2007 hingga 2011. Karena data yang digunakan adalah data *time series* maka populasi akan sekaligus menjadi sampel penelitian (Munarfah dan Hasan, 2009:72-79). Data yang diperoleh dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara.

Data yang diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui disparitas pendapatan dengan menggunakan *Williamson Index*. Formula ini pada dasarnya sama dengan *coefficient of variation* (CV) biasa, dimana standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Williamson (1965) memperkenalkan CV ini dengan menimbanginya dengan proporsi penduduk, yang disebut CV. Formulanya adalah sebagai berikut:

$$CV_w = \frac{\sqrt{\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2 \frac{n_i}{n}}}{\bar{Y}}$$

Dimana:

CV_w : *weighted coefficient of variation*
 n_i : penduduk di daerah i
 n : penduduk total
 \bar{Y}_i : pendapatan perkapita di daerah i
 \bar{Y} : rata-rata pendapatan perkapita untuk semua daerah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini kondisi kemiskinan dapat dilihat dari banyaknya rumah tangga miskin, yaitu penduduk yang hidup berada di bawah garis kemiskinan yang ada di Kecamatan Galesong Selatan tahun 2011 dengan indikator : (1) Rumah yang tidak layak huni, seperti lantai rumah yang bukan dari tegel atau hanya terbuat dari semen, dinding rumah yang terbuat dari kayu, tripleks, atau anyaman bambu dan atap dari seng atau dari pelepah daun kelapa; (2) Pendapatan yang diterima rumah tangga sekitar Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,- perbulan; dan (3) tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Rumah tangga miskin di Kecamatan Galesong Selatan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2011

No.	Kecamatan	Rumah Tangga Miskin	Jumlah Rumah Tangga
1.	Mangindara	60	485
2.	Bontomarannu	241	721
3.	Barammase	146	471
4.	Bonto Kassi	164	372
5.	Sawakong	204	714
6.	Bentang	67	215
7.	Bonto Kanang	338	937
8.	Popo	260	513
9.	Taroang	83	469
10.	Kadatong	64	260
11.	Kale Bentang	84	241

Sumber: Kecamatan Galesong Selatan dalam Angka, 2012

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah rumah tangga keluarga di kecamatan Galesong Selatan sebanyak 31,70 persen rumah tangga mengalami kemiskinan. Desa yang memiliki jumlah rumah tangga yang mengalami kemiskinan terbanyak adalah Desa Popo sebesar 50,70 persen, diikuti Desa Bonto Kassi sebesar 44,10 persen. Rata-rata desa yang mengalami kemiskinan adalah desa yang letaknya di pesisir pantai. Kemiskinan di Kecamatan Galesong Selatan didominasi oleh kelompok nelayan. Selama tahun 2012 – 2013 telah terjadi peningkatan kemiskinan di Kecamatan Galesong Selatan. Akan tetapi belum terdaftar sebagai masyarakat yang berada dalam kondisi miskin.

Salah satu sisi untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian suatu wilayah, tidak hanya dilihat dari perkembangan nilai PDRB akan tetapi juga dapat dilihat dari besarnya pendapatan perkapita. Setiap tahun PDRB per kapita Kabupaten Takalar dan Kecamatan Galesong Selatan terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. PDRB Per Kapita Kecamatan Galesong Selatan dan Kabupaten Takalar, Tahun 2007–2011

Tahun	PDRB Per Kapita	
	Kecamatan Galesong Selatan	Kabupaten Takalar
2007	3.935.040	5.070.562
2008	4.729.811	6.077.413
2009	5.561.853	7.123.207
2010	5.865.122	7.622.678
2011	6.350.156	8.696.184
Rata-rata	5.288.396	6.918.009

Sumber: Kabupaten Takalar dalam Angka, 2012

Bila dibandingkan dengan PDRB per kapita Kabupaten Takalar, PDRB Kecamatan Galesong Selatan masih rendah. Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 PDRB per kapita kecamatan Galesong selatan masih sekitar Rp. 6.350.156 sementara PDRB per kapita Kabupaten Takalar mencapai Rp. 8.696.184. Ini membuktikan bahwa perekonomian Galesong Selatan masih dibawah rata-rata perekonomian di Kabupaten Takalar. Selain Kecamatan Galesong Selatan, masih banyak kecamatan yang PDRB per kapitanya masih berada dibawah PDRB per kapita Kabupaten Takalar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. PDRB Per kapita Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2009 – 2011

No	Kecamatan	PDRB per kapita (Rupiah)		
		2009	2010	2011
1.	Mangarabombang	4.697.391	5.129.502	5.410.886
2.	Mappakasunggu	9.569.027	10.140.241	11.539.747
3.	Sanrobone	4.324.524	4.751.830	4.805.274
4.	Polombangkeng Selatan	4.489.295	4.915.963	5.639.020
5.	Pattalassang	12.490.786	12.890.444	14.893.755
6.	Polombangkeng Utara	4.674.191	4.794.843	5.314.355
7.	Galesong Selatan	5.561.853	5.865.122	6.350.156
8.	Galesong	8.117.013	8.540.557	9.502.517
9.	Galesong Utara	9.511.315	10.907.767	13.603.467
	Kab. Takalar	7.123.207	7.622.678	8.696.184

Sumber: Kabupaten Takalar dalam Angka, 2012

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa PDRB per kapita di Takalar belum merata di setiap kecamatan. Kecamatan dengan PDRB per kapita yang tertinggi di Kabupaten Takalar pada tahun 2011 adalah Kecamatan Pattalassang sebesar Rp. 14.893.755, diikuti Kecamatan Galesong Utara sebesar Rp. 13.603.467 dan Kecamatan Mappakasunggu sebesar Rp. 11.539.747. Kecamatan dengan PDRB per kapita yang

terendah adalah Kecamatan Sanrobone sebesar Rp. 4.805.274, diikuti Kecamatan Polombangkeng Utara sebesar Rp. 5.314.355 dan Kecamatan Polombangkeng Selatan sebesar Rp. 5.639.020.

Analisis yang dihasilkan dari perhitungan Indeks Williamson dapat menjelaskan sejauh mana kondisi ketimpangan pendapatan di Kecamatan Galesong Selatan. Indeks Williamson bernilai positif dan berkisar antara nol sampai dengan satu. Semakin besar nilai indeks ini (mendekati angka satu) berarti semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan antar Kecamatan di Kabupaten Takalar. Sebaliknya semakin kecil nilai indeks ini (mendekati angka nol) berarti semakin merata tingkat pemerataan antar kecamatan di Kabupaten Takalar.

Kecamatan Galesong Selatan sebagai salah satu kecamatan yang berkembang di Kabupaten Takalar masih memiliki tingkat ketimpangan yang sedang selama periode waktu penelitian, yaitu mulai tahun 2007 hingga tahun 2011. Dikatakan sedang karna nilai ketimpangan distribusi pendapatan Kecamatan melalui Indeks Williamson dengan rata-rata sebesar 0,5242 dan berada ditengah angka 0 dengan 1. Hasil perhitungan Indeks Williamson Kecamatan Galesong Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Indeks Williamson Kecamatan Galesong Selatan Tahun 2007-2011

Tahun	Indeks Williamson
2007	0,4970
2008	0,5037
2009	0,5103
2010	0,5144
2011	0,5954
Rata-rata	0,5242

Sumber: Hasil olah data, 2013

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa indeks ketimpangan pendapatan di Kecamatan Galesong Selatan selama periode 2007 - 2011 rata-rata sebesar 0,5242. Terjadi kenaikan ketimpangan PDRB per kapita di Kecamatan Galesong Selatan setiap tahunnya, seperti tahun 2007 Indeks Williamson sebesar 0,4970 naik menjadi sebesar 0,5954 tahun 2011. Hal tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kabupaten Takalar juga diikuti dengan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Takalar, salah satunya Kecamatan Galesong Selatan.

Pada tahun 2007 sampai 2010, peningkatan indeks ketimpangan distribusi pendapatan di karenakan oleh beberapa faktor yang sama yaitu tidak adanya investasi di wilayah ini yang menyebabkan kurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya yang tidak diiringi kualitas sumberdaya manusia. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan secara drastis yaitu sebesar 0,5954. Peningkatan ini di akibatkan pada tahun terjadinya kemunduran jumlah industri besar-besaran di Kecamatan Galesong Selatan pada tahun 2011. Kemunduran industri inilah yang menyebabkan banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaannya dan berdampak semakin timpangnya distribusi pendapatan di Kecamatan Galesong Selatan.

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Ketimpangan wilayah merupakan salah satu

permasalahan pembangunan belum dapat dipecahkan khususnya pada negara-negara sedang berkembang. Ketimpangan wilayah ini terjadi dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan, serta tingkat kesulitan mengatasinya. Menurut Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Galesong Selatan, Muhammad Amir, BA (Wawancara: 10/8/2013) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Kecamatan Galesong Selatan ada 2, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi adalah kurangnya investasi dan jumlah industri. Sedangkan faktor non-ekonomi yang mempengaruhi adalah semakin bertambahnya bukan umur produktif, kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan dan selalu berharap pada bantuan pemerintah.

Pertumbuhan penduduk Kecamatan Galesong Selatan yang semakin meningkat setiap tahunnya dapat menjadi modal pembangunan bila memiliki kualitas yang memadai. Hal ini mengacu pada konsep bahwa manusia merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Artinya, dengan kualitas penduduk yang rendah, maka manusia akan lebih banyak berperan sebagai penikmat dan kurang berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Di samping itu muncul kesadaran bahwa pembangunan tidak hanya bisa tergantung pada sumber daya alam. semestinya mengandalkan sumber daya manusia.

Teknologi sebagai sumber daya pembangunan yang lain memang menjadi penting pula belakangan ini. Namun perkembangan dan pemanfaatan teknologi itu sendiri sangat tergantung pada manusia. Pengalaman-pengalaman negara maju seperti Jerman, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, serta negara-negara industri baru, seperti Korea Selatan dan Taiwan. menunjukkan bahwa pertumbuhan mereka sebagian mereka besar didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi (Faturachman dan Widaningrum, 2010:1). Dengan tersedianya sumber daya yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas.

Semakin tingginya tingkat pendidikan sumber daya manusia, maka meningkatkan produktivitas dan membuka kesempatan kerja. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di Kecamatan Galesong Selatan. Menurut Todaro dan Smith (2006:262-269) ada empat bidang luas yang terbuka bagi intervensi kebijakan pemerintah masing-masing berkaitan erat dengan keempat elemen pokok yang merupakan faktor-faktor penentu utama atau baik tidaknya kondisi-kondisi distribusi pendapatan di sebagian negara berkembang. Adapun keempat elemen pokok tersebut adalah (1) distribusi fungsional, (2) distribusi ukuran, (3) program redistribusi pendapatan, dan (4) peningkatan distribusi pendapatan langsung. Ada pun intervensi kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di berbagai daerah, salah satunya di Kecamatan Galesong Selatan seperti program redistribusi pendapatan dan peningkatan distribusi pendapatan langsung, terutama bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berpenghasilan yang relatif rendah.

Upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan mulus. Program pendidikan gratis untuk membantu masyarakat yang kurang mampu belum cukup merangsang sebagian masyarakat yang hidup di garis kemiskinan. Masyarakat Galesong Selatan yang berumur 12 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun yang seharusnya mengenyam bangku pendidikan, malah lebih memilih untuk bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Selain itu sarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sangat minim. Sehingga masa depan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji cukup sangatlah sulit. Selain masalah kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan, Kecamatan Galesong Selatan masih memiliki beberapa masalah lain, seperti kurangnya investasi.

Menurut Keynes (dalam Hoppe, 2007:4) investasi mempunyai peranan penting yaitu sebagai determinan *employment* dan pendapatan. Kesempatan kerja bagi masyarakat sangat bergantung pada investasi. Investasi akan meningkatkan kegiatan ekonomi, baik berskala besar maupun kegiatan ekonomi kerakyatan sehingga mendorong kemampuan pemda, swasta dan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang bergairah akan mampu menciptakan pasar tenaga kerja, iklim usaha yang kompetitif, meningkatkan perputaran uang dan mendatangkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Selama lima tahun terakhir, investasi di Kabupaten Takalar hanya ada di tahun 2007, 2009 dan 2011. Dari semua investasi tersebut tidak ada satu pun bertempat di Kecamatan Galesong selatan. Faktor ini menyebabkan kurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

PENUTUP

Dari hasil analisis dengan menggunakan Indeks Williamson, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Kecamatan Galesong Selatan adalah ketimpangan yang berada dalam kategori sedang dan cenderung mengalami peningkatan selama periode 2007 – 2011. Peningkatan drastis ketimpangan distribusi pendapatan terjadi pada tahun 2011 sebesar 0,5954 dengan PDRB per kapita sebesar Rp. 6.350.156. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Kecamatan Galesong Selatan ada 2 yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi adalah kurangnya investasi dan jumlah industri. Sedangkan faktor non-ekonomi yang mempengaruhi adalah semakin bertambahnya penduduk bukan umur produktif, kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan dan selalu berharap pada bantuan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, Irma and Cynthia T. Morris. 1973. *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*. Stanford: Stanford University Press.
- Ananaim. 2012. *Kecamatan Galesong Selatan dalam Angka 2012*. Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Anonim. 2012. *Kabupaten Takalar dalam Angka 2012*. Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Faturochman dan Ambar Widaningrum. 2010. *Masalah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Diakses dari <http://id.scribd.com/doc/180888879/KORAN-Masalah-Dan-Pengembangan-Sumberdaya-Manusia> (diakses pada tanggal 06 September 2013)
- Hoppe, H. H. 2007. *Teori Umum Keynes dalam Pandangan Misesian*. Ciputat: Sanctuary Publishing.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makroekonomi (Edisi 6)*. Jakarta: Erlangga.
- Munarfah, Andi dan Muhammad Hasan. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Praktika Aksara Semesta.
- Rahardja, Prathama, dan Mandala Manurung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: LP-FEUI.
- Tambunan, Tulus T.H. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael dan Stephen Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 (Edisi 9)*. Jakarta: Erlangga.
- Williamson, H.F, dan Butrick. 1965. *Economic Development Principles and Patterns*. UK: Cambridge University Press.